

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jumania Septariani<sup>1</sup>, Rano Asoka<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STIE Rahmadiyah Sekayu, Palembang, Indonesia, [jseptariani@gmail.com](mailto:jseptariani@gmail.com)

<sup>2</sup>STIE Rahmadiyah Sekayu, Palembang, Indonesia, [ranoasokastier@gmail.com](mailto:ranoasokastier@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to determine the regional financial performance of the Government of Musi Banyuasin Regency. The research method used by the author in this study is a quantitative method. The type of data used by the author in this study is secondary data in the form of budget realization report. The results of the study stated that the financial performance of the Musi Banyuasin Regency Government was quite good. However, the Government of Musi Banyuasin Regency was still not independent in managing regional finances and was dependent on the central/provincial government. This was based on the fact that the average degree of decentralization ratio of the Musi Banyuasin Regency Government was 7.50% with the criteria of not being independent, the average financial independence ratio of the Musi Banyuasin Regency Government was 8.68% with very low criteria and the pattern of instructive relations. The average local tax effectiveness ratio of the Musi Banyuasin Regency Government was 91.57% with effective criteria. The average collection efficiency ratio of the Musi Banyuasin Regency Government was 7.71% with the criteria of being very efficient and the ratio of expenditure harmony at the Musi Banyuasin Regency Government was already good because the results of the operating expenditure ratio and the results of the capital expenditure ratio from 2015 to 2019 <100%.*

**Keywords:** Budget, Budget Realization Report, Financial Performance

**PENDAHULUAN**

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah menimbulkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah

untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan. Analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi 3 (tiga) pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Melalui analisa ini, pemerintah daerah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu dari 16 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan dengan ibukota Kota Sekayu yang memiliki luas wilayah  $\pm 14.265,96$  km<sup>2</sup> yang terbentang pada lokasi 1,3° - 4° LS, 103° - 105° BT, di Kabupaten Musi Banyuasin. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa masalah dalam meningkatkan penerimaan APBD. Berikut ini disajikan data tentang Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	%	Surplus (Defisit)
2015	2.034.401.344.567	2.096.431.426.307	97,04	(62.030.081.740)
2016	2.640.255.197.404	2.280.009.346.065	100,6	360.245.851.339
2017	2.642.776.006.641	2.340.644.994.246	100,9	302.131.012.395
2018	3.019.699.825.935	2.569.468.000.595	102,1	450.231.825.340
2019	3.941.909.794.940	3.160.193.342.676	124,7	781.716.452.264

Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung mengalami surplus anggaran dimana pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah. Hal ini dikarenakan terjadi pengurangan pagu dana belanja daerah. Pada tahun 2015 mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 62.030.081.740. Hal ini dikarenakan komponen pendapatan asli daerah tidak terealisasi dengan baik yaitu pajak daerah,

retribusi daerah, hasil kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga berkurangnya penerimaan pada pendapatan daerah. Pada Tahun 2016 sampai 2019 selalu mengalami surplus anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan optimalisasi pendapatan daerah akan tetapi, belanja daerah yang telah dianggarkan sebelumnya tidak terlaksana dengan baik.

## METODOLOGI PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Dokumentasi

Pada penelitian ini Penulis mendokumentasikan data-data tentang target dan realisasi penerimaan APBD Tahun 2014 sampai dengan 2018 dan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

### 2. Studi Pustaka

Pada penelitian ini Penulis menelaah teori-teori yang bersumber dari buku-buku teks dan jurnal yang menjadi acuan Penulis dalam membuat landasan teori.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menghitung :

#### 1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 2. Rasio Kemandirian Keuangan

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

#### 3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

#### 4. Analisis Keserasian Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak yang berkompeten dan terkait dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian

diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Laporan Realisasi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat, dan dampak.

### Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rumus rasio derajat desentralisasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Jika nilai Derajat Desentralisasi > 50%, maka daerah dikatakan semakin mandiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Sebaliknya jika nilai Derajat Desentralisasi < 50%, maka daerah dikatakan belum cukup mandiri karena ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Berdasarkan rumus perhitungan rasio derajat desentralisasi, berikut ini data tentang pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah dan Pendaptan Daerah Tahun 2015 sampai dengan 2019  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah
2015	181.795.444.466	2.034.401.344.567
2016	169.012.416.526	2.640.255.197.404
2017	209.410.035.753	2.642.776.006.641
2018	210.238.037.283	3.019.699.825.935
2019	286.594.847.515	3.941.909.794.940

Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan rumus dan data di atas, berikut ini disajikan perhitungan rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:

a) Tahun 2015

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Rp. 181.795.444.466}}{\text{Rp. 2.034.401.344.567}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi} = 8,94\%$$

b) Tahun 2016

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Rp. 169.012.416.526}}{\text{Rp. 2.640.255.197.404}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi} = 6,40\%$$

c) Tahun 2017

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Rp. 209.410.035.753}}{\text{Rp. 2.642.776.006.641}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi} = 7,92\%$$

d) Tahun 2018

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Rp. 210.238.037.283}}{\text{Rp. 3.019.699.825.935}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi} = 6,96\%$$

e) Tahun 2019

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Rp. 286.594.847.515}}{\text{Rp. 3.941.909.794.940}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi} = 7,27\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, berikut ini data tentang rekapitulasi perhitungan rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:

Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	%
2015	181.795.444.466	2.034.401.344.567	8,94
2016	169.012.416.526	2.640.255.197.404	6,40
2017	209.410.035.753	2.642.776.006.641	7,92
2018	210.238.037.283	3.019.699.825.935	6,96
2019	286.594.847.515	3.941.909.794.940	7,27
Rata-rata			7,50

Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa perhitungan rasio derajat desentralisasi di atas dapat diketahui bahwa analisis rasio keuangan yang dihitung dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi Tahun 2015 sebesar 8,94% dimana rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa belum mandiri karena kurang dari 50%. Rasio derajat desentralisasi pada Tahun 2016 dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni dengan rasio sebesar 6,40% yang menunjukkan bahwa rasio tersebut belum mandiri karena kurang dari 50%. Pada Tahun 2017 rasio derajat desentralisasi sebesar 7,92% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun rasio tersebut belum bisa dikatakan mandiri karenan masih kurang dari 50%. Pada Tahun 2018 rasio derajat desentralisasi sebesar 6,96% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun rasio tersebut belum bisa dikatakan mandiri karenan masih kurang dari 50%. Pada Tahun 2019 rasio derajat desentralisasi sebesar 7,27% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun rasio tersebut belum bisa dikatakan mandiri karena masih kurang dari 50%.

Rasio derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara rata-rata sebesar 7,50% dengan kriteria belum mandiri karena belum mencapai persentase lebih dari 50%. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan asli daerah lebih kecil dari pada pendapatan daerah lainnya. Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 hasil dari persentase rasio derajat desentralisasi tersebut belum mandiri, hal ini dibenarkan juga oleh Kepala Bidang Akuntansi bahwa memang belum mandiri, salah satu penyebabnya adalah realisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) masih terlalu kecil terkhusus sektor pajak dan retribusi daerah dibandingkan dana transfer atau pendapatan transfer.

### Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi}} \times 100\%$$

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4  
Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kemandirian Keuangan	Pola Hubungan
0-25 %	Rendah Sekali	Instruktif
25-50 %	Rendah	Konsultatif
50-75 %	Sedang	Partisipatif
75- 100 %	Tinggi	Delegatif

Sumber: Mahmudi (2016:137)

Berdasarkan rumus perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, berikut ini data tentang pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah pusat/propinsi Kabupaten Musi Banyuasin :

Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah dan Pendaptan Daerah Tahun 2015 sampai dengan 2019  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi
2015	181.795.444.466	1.723.626.133.366
2016	169.012.416.526	2.470.145.506.378
2017	209.410.035.753	2.343.603.836.888
2018	210.238.037.283	2.499.023.108.651
2019	286.594.847.515	3.302.686.527.069

Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan rumus dan data di atas, berikut ini disajikan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:

a) Tahun 2015

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi}} \times 100\%$$

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Rp. 181.795.444.466}}{\text{Rp. 2.034.401.344.567}} \times 100\%$$

Kemandirian Keuangan	=	10,55%	
b) Tahun 2016			
Kemandirian Keuangan	=	$\frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi}}$	X100%
Kemandirian Keuangan	=	$\frac{\text{Rp. 169.012.416.526}}{\text{Rp. 2.640.255.197.404}}$	X 100%
Kemandirian Keuangan	=	6,84%	
c) Tahun 2017			
Kemandirian Keuangan	=	$\frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi}}$	X100%
Kemandirian Keuangan	=	$\frac{\text{Rp. 209.410.035.753}}{\text{Rp. 2.642.776.006.641}}$	X 100%
Kemandirian Keuangan	=	8,94%	
d) Tahun 2018			
Kemandirian Keuangan	=	$\frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi}}$	X100%
Kemandirian Keuangan	=	$\frac{\text{Rp. 210.238.037.283}}{\text{Rp. 3.019.699.825.935}}$	X 100%
Kemandirian Keuangan	=	8,41%	
e) Tahun 2019			
Kemandirian Keuangan	=	$\frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi}}$	X100%
Kemandirian Keuangan	=	$\frac{\text{Rp. 286.594.847.515}}{\text{Rp. 3.941.909.794.940}}$	X 100%
Kemandirian Keuangan	=	8,68%	



Berdasarkan perhitungan di atas, berikut ini data tentang rekapitulasi perhitungan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:

Tabel 6. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi	% Rasio	Kriteria
2015	181.795.444.466	1.723.626.133.366	10,55	Rendah Sekali (<25%)
2016	169.012.416.526	2.470.145.506.378	6,84	Rendah Sekali (<25%)
2017	209.410.035.753	2.343.603.836.888	8,94	Rendah Sekali (<25%)
2018	210.238.037.283	2.499.023.108.651	8,41	Rendah Sekali (<25%)
2019	286.594.847.515	3.302.686.527.069	8,68	Rendah Sekali (<25%)
Rata-rata			8,68	Rendah Sekali (<25%)

Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa perhitungan analisis rasio keuangan yang dihitung dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan Tahun 2015 sebesar 10,55% dimana rasio kemandirian keuangan tersebut menunjukkan kriteria rendah sekali karena persentasenya masih di bawah 25% dengan pola hubungan yaitu instruktif, artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin atau Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah tidak mencapai target dari segala sektor baik itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rasio kemandirian keuangan pada Tahun 2016 dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni dengan rasio sebesar 6,84% yang menunjukkan bahwa rasio tersebut juga masih rendah sekali dengan pola hubungan yaitu instruktif. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah. Pada Tahun 2017 rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 8,94% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun rasio tersebut juga masih dikategorikan rendah sekali, karena persentasenya masih dibawah 25% dengan pola hubungan yaitu instruktif. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Akan tetapi, target penerimaan pendapatan asli daerah tidak tercapai. Rasio kemandirian keuangan pada Tahun 2018 dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni dengan rasio sebesar 8,41% yang menunjukkan bahwa rasio tersebut juga masih rendah sekali dengan pola hubungan yaitu instruktif. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pada Tahun 2019 rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 8,68% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun rasio tersebut juga masih dikategorikan rendah sekali, karena persentasenya masih dibawah 25% dengan pola hubungan yaitu instruktif. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan asli daerah masih sangat kecil dibandingkan dana transfer yang disebabkan oleh tidak mencapai target pendapatan asli daerah dari segala sektor baik itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 secara rata-rata sebesar 8,68% dengan kriteria rendah sekali dan pola hubungan instruktif. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum baik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa kemandirian keuangan tidak pernah mencapai lebih dari 50% hal ini salah satunya disebabkan oleh masih kecilnya Realisasi PAD yang diterima setiap tahunnya dibandingkan pendapatan transfer yang diperoleh setiap tahunnya.

### Analisis Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Rasio efektifitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria efektifitas pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
Lebih dari 100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016:137)

Berdasarkan rumus perhitungan rasio efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah, berikut ini data tentang target dan realisasi pajak daerah serta biaya pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin:

Tabel 8. Target, Realisasi, Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Taget	Realisasi	Biaya Pemungutan
2015	64.500.000.000	53.150.297.670	15.922.132.858
2016	66.037.462.273	59.484.298.430	3.902.661.176
2017	69.978.188.000	58.677.094.555	596.462.623
2018	72.700.935.000	81.342.647.355	189.977.380
2019	78.038.197.000	69.943.956.305	561.053.652

Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan rumus dan data di atas, berikut ini disajikan perhitungan rasio efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:

a) Tahun 2015

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 53.150.297.670}}{\text{Rp. 64.500.000.000}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 82,40\%$$

b) Tahun 2016

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 59.484.298.430}}{\text{Rp. 66.037.462.273}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 92,08\%$$

c) Tahun 2017

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 58.677.094.555}}{\text{Rp. 69.978.188.000}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 83,85\%$$

d) Tahun 2018

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 81.342.647.355}}{\text{Rp. 72.700.935.000}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 111,89\%$$

e) Tahun 2019

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 69.943.956.305}}{\text{Rp. 78.038.197.000}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 89,63\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, berikut ini data tentang rekapitulasi perhitungan rasio efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:

Tabel 9. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Taget	Realisasi	Rasio	Kriteria
2015	64.500.000.000	53.150.297.670	82,40%	Cukup Efektif
2016	66.037.462.273	59.484.298.430	90,08%	Efektif
2017	69.978.188.000	58.677.094.555	83,85%	Cukup Efektif
2018	72.700.935.000	81.342.647.355	111,89%	Sangat Efektif
2019	78.038.197.000	69.943.956.305	89,63%	Cukup Efektif
Rata-rata			91,57%	Efektif

Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 9 di atas, dapat dilihat bahwa perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015-2019 dapat dikatakan bahwa dari tahun ke tahun rasio efektivitas pajak daerah cenderung meningkat, rasio efektivitas pajak daerah dinilai dari indikator rasio efektivitas pajak daerah sudah efektif dan akan berdampak pada peningkatan penerimaan APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Rasio terbesar terjadi pada Tahun 2018 sebesar 111,89% dan rasio terkecil pada Tahun 2015 sebesar 82,40% dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 91,57%. Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 realisasi pajak daerah cenderung meningkat serta rata-rata persentase yang dihasilkan dalam kategori efektif. Salah satu penyebab hal ini terjadi karena penagihan dilakukan secara langsung ke pada masyarakat sehingga berdampak baik terhadap pencapaian realisasi pajak daerah yang diperoleh.

### Analisis Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah diperlukan data tentang biaya pemungutan pajak. Rasio efisiensi pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi pajak daerah adalah sebagai Berikut:

Tabel 10. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria
<10	Sangat efisien
10 – 20	Efisien
21 – 30	Cukup efisien
31 – 40	Kurang efisien
>40	Tidak efisien

Sumber: Mahmudi (2016:138)

Berdasarkan rumus perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah, berikut ini data tentang target dan realisasi pajak daerah serta biaya pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin:

Tabel 11. Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi
2015	15.922.132.858	53.150.297.670
2016	3.902.661.176	59.484.298.430
2017	596.462.623	58.677.094.555
2018	189.977.380	81.342.647.355
2019	561.053.652	69.943.956.305
Rata-rata		

Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berikut ini perhitungan rasio efisiensi pajak daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:

a) Tahun 2015

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 15.922.132.858}}{\text{Rp. 53.150.297.670}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 29,96\%$$

b) Tahun 2016

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 3.902.661.176}}{\text{Rp. 59.484.298.430}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 6,56\%$$

c) Tahun 2017

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp. } 596.462.623}{\text{Rp. } 58.677.094.555} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 1,02\%$$

d) Tahun 2018

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp. } 189.977.380}{\text{Rp. } 81.342.647.355} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 0,23\%$$

e) Tahun 2019

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp. } 561.053.652}{\text{Rp. } 69.943.956.305} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 0,80\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, berikut ini data tentang rekapitulasi perhitungan rasio efisiensi pemungutan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:

Tabel 12. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi	% Rasio	Kriteria
2015	15.922.132.858	53.150.297.670	29,96	Cukup Efisiensi
2016	3.902.661.176	59.484.298.430	6,56	Sangat Efisien
2017	596.462.623	58.677.094.555	1,02	Sangat Efisien
2018	189.977.380	81.342.647.355	0,23	Sangat Efisien
2019	561.053.652	69.943.956.305	0,80	Sangat Efisien
Rata-rata			7,71	Sangat Efisien

Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 12 di atas, dapat dilihat bahwa perhitungan rasio efisiensi pajak daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015-2019 disimpulkan sangat efisien dimana rata-rata rasio efisiensi hanya sebesar 7,71% karena Pemerintah melakukan cara penagihan langsung kepada masyarakat. Hal ini berdampak positif terhadap realisasi

penerimaan pajak daerah yang secara langsung berdampak positif terhadap APBD dan PAD Kabupaten Musi Banyuasin.

### Analisis Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Dengan penilaian jika rasio keserasian belanja <100% maka dikategorikan baik pengalokasian dana belanja tersebut, sebaliknya jika rasio keserasian belanja >100% maka dikategorikan belum baik pengalokasian dana belanja tersebut, serta berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi bahwa jika persentase rasio dari belanja langsung lebih besar dari persentase rasio belanja tidak langsung maka keserasian belanja dikatakan semakin baik.

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja antara lain berupa analisis belanja operasi terhadap total belanja dan belanja modal terhadap total belanja daerah. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio keserasian belanja daerah:

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian belanja ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Dengan penilaian semakin optimal pengalokasian dana tersebut maka semakin dikatakan baik kinerja anggaran belanja pada pemerintahan tersebut.

Berdasarkan rumus di atas, berikut ini disajikan data tentang belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin:

Tabel 13. Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Daerah
2015	1.027.797.661.260	1.068.633.765.047	2.096.431.426.307
2016	1.710.307.088.459	569.702.257.606	2.280.009.346.065
2017	1.639.803.413.474	699.529.017.374	2.340.644.994.246
2018	1.697.465.133.203	871.952.810.972	2.569.468.000.595
2019	2.056.860.843.111	1.102.419.234.360	3.160.193.342.676

Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan rumus dan data di atas, berikut ini disajikan perhitungan rasio keserasian belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:

## a) Tahun 2015

## 1. Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Rp. 1.027.797.661.260}}{\text{Rp. 2.096.431.426.307}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = 49,03\%$$

## 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Rp. 1.068.633.765.047}}{\text{Rp. 2.096.431.426.307}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = 50,97\%$$

## b) Tahun 2016

## 1. Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Rp. 1.710.307.088.459}}{\text{Rp. 2.280.009.346.065}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = 75,01\%$$

## 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Rp. 569.702.257.606}}{\text{Rp. 2.280.009.346.065}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = 24,99\%$$



## c) Tahun 2017

## 1. Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Rp. 1.639.803.413.474}}{\text{Rp. 2.340.644.994.246}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = 70,06\%$$

## 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Rp. 699.529.017.374}}{\text{Rp. 2.340.644.994.246}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = 29,89\%$$

## d) Tahun 2018

## 1. Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Rp. 1.697.465.133.203}}{\text{Rp. 2.569.468.000.595}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = 66,06\%$$

## 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Rp. 871.952.810.972}}{\text{Rp. 2.569.468.000.595}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = 34,94\%$$

e) Tahun 2019

1. Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Rp. 2.056.860.843.111}}{\text{Rp. 3.160.193.342.676}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah} = 65,09\%$$

2. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Rp. 1.102.419.234.360}}{\text{Rp. 3.160.193.342.676}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah} = 34,88\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, berikut ini data tentang rekapitulasi perhitungan rasio keseraian belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 :

Tabel 14. Rekapitulasi Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Dalam Persentase)

Tahun	Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah
2015	49,03	50,97
2016	75,01	24,99
2017	70,06	29,89
2018	66,06	33,94
2019	65,09	34,88
Rata-rata	65,05	34,93

Sumber :BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 14 di atas tentang perhitungan rasio belanja langsung terhadap total belanja rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja sebesar 65,05% rasio ini dapat dikatakan baik atau pengalokasian dana tersebut sudah dilakukan dengan baik karena kurang <100%. Rasio belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2015-2019 rata-rata sebesar 34,93%. Rasio ini dapat dikatakan baik atau pengalokasian dana tersebut sudah dilakukan dengan baik karena <100%. Keserasian Belanja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini sudah baik karena hasil rasio belanja operasi dan hasil rasio belanja modal dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun tahun 2019 selalu <100%. Serta pengalokasian dana yang ada lebih besar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat hal ini dapat dilihat hasil dari rasio belanja

barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rata-rata rasio belanja langsung lebih besar dari hasil rata-rata rasio belanja tidak langsung.

## KESIMPULAN

kinerja pengelolaan anggaran pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara rata-rata sebesar 7,50% dengan kriteria belum mandiri karena belum mencapai persentase lebih dari 50%. Kinerja pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 secara rata-rata sebesar 8,68% dengan kriteria rendah sekali dan pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah baik. Hal ini dikarenakan rasio efektivitas pajak daerah sudah efektif dan rasio efisiensi pemungutan pajak daerah dalam kategori sangat efisien. Keserasian belanja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini sudah baik karena hasil rasio belanja operasi dan hasil rasio belanja modal dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 selalu <100%. Serta pengalokasian dana yang ada lebih besar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat hal ini dapat dilihat hasil dari rasio belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rata-rata rasio belanja langsung lebih besar dari hasil rata-rata rasio belanja tidak langsung.

## REFERENSI

- Bastian, Indra. 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdullah. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Nordiawan, Dedi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nur, Astria Jannah Dien, Jantje Tinangon dan Stanley Walandouw. 2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA Vol 3 Nomor 1*. Universitas Sam Ratulangi
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ridwan. 2012. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sholihah, Ratna. 2011. *Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta